BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terbentuknya pemerintahan Negara Pasundan di Jawa Barat terdiri dari berbagai macam faktor ekonomi, dan sosial-politik. Berdasarkan pada faktor ekonomi, Jawa Barat merupakan kawasan industri perkebunan hingga industri properti dan transportasi yang sudah dikembangkan sejak berlangsungnya pemerintahan Hindia-Belanda. Sehingga, ketika Jepang mengambil alih pemerintahan dan menyerahkan kemerdekaan ke tangan Republik Indonesia, dengan tekad yang bulat Belanda membangun koloni untuk melakukan kerjasama agar Belanda masih memiliki kuasa atas wilayah Jawa Barat. Tekad pemerintah Belanda ini tertuang pada proklamasi Negara Pasundan Kartalegawa yang menyatakan bahwa PRP akan mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan onderneming-onderneming kepunyaan bangsa asing kepada yang punya. Sedangkan berdasar pada situasi sosial-politik yang menjadi faktor pembentukan Negara Pasundan adalah adanya desentralisasi dari kalangan *Menak Sunda* yang menolak kepemimpinan orang Jawa. Oleh karena itu, penamaan "Pasundan" merupakan wujud separatis untuk menghidupkan sukuisme Sunda. Strategi yang digunakan oleh pemerintah Belanda adalah dengan

mendekati dan memberi doktrin kepada kaum menak Sunda untuk membebaskan wilayahnya dari kedaulatan republik dengan membentuk Recomba (*Regerings Commissaris Bestuursangelegenheden*) atau Komisaris Urusan Administrasi Pemerintah. Atas desakan Belanda mereka berupaya menyelenggarakan konferensi untuk membebaskan wilayah Jawa Barat dari RI. Konferensi Jawa Barat itu terjadi tiga kali, dan dampaknya ialah secara resmi pendirian Negara Pasundan.

2. Mekanisme birokrasi pemerintahan Negara Pasundan berasaskan pada sistem parlementer, dimana perdana menteri yang memegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada parlemen. Anggota-anggota parlemen Pasundan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1948, dengan ketua parlemennya adalah R. Tg. Djuwarsa, R. Suradiradja sebagai Wakil Ketua I, R. Pandji Sunario sebagai Wakil Ketua II, dan Drs. Tan Eng Oen sebagai Wakil Ketua III. Pada tanggal 24 April 1948 dalam sidang parlemen R.A.A.M Wiranatakusumah dilantik sebagai Wali Negara Pasundan dan di waktu yang bersamaan pula, Wali Negara menunjuk R. Adil Purwadireja sebagai Formatur Kabinet. Dalam sidang Parlemen juga turut diresmikan nama Negara Pasundan dan bendera negara hijau-putih sebagai lambang harapan dan kesucian. Lambang Negara Pasundan juga turut diresmikan, salah satu komponen penting dalam lambang

Negara Pasundan itu adalah adanya simbol harimau pajaran serta semboyan yang berbunyi "*Gemah-ripah, pasir-woekir, loh-djinawi*" dengan makna dari pribahasa tersebut berupa "Negara Pasundan yang masyhur karena kekayaan dan kesuburannya, tidak kekurangan pakaian dan makanan, dan terjaga oleh harimau Pajajaran".

3. Faktor-faktor dalam pembubaran Negara Pasundan terjadi karena tiga hal. Yaitu pertama karena adanya penolakan rakyat Jawa Barat akan adanya Negara Pasundan, penolakan itu dapat dideskripsikan dengan adanya resolusi sebagai bentuk gugatan atas berdirinya Negara Pasundan. Faktor kedua adanya konflik perebutan wilayah antara DI/TII dan TNI, dan faktor ketiga adalah adanya konflik internal pemerintahan Negara Pasundan yang menginginkan pemerintahan diambil alih oleh Republik Indonesia. Konflik internal tersebut terjadi karena tentara Belanda yang memiliki tugas untuk menjaga keamaanan tidak mampu untuk menahan serangan DI/TII, sehingga aparat pemerintahan Negara Pasundan melakukan kerjasama dengan militer RI agar keamanan dapat berlangsung di Negara Pasundan. Selain daripada itu, aparat pemerintahan Negara Pasundan yang didominasi oleh kaum republiken menentang desakan Belanda akan adanya politik intimidasi pada Negara Republik Indonesia. Sehingga sering terjadi kekosongan kabinet Negara Pasundan sebagai bentuk

pertentangan untuk kebijakan yang diadakan oleh pemerintah Belanda.

B. Saran-saran

1. Peristiwa berdirinya Negara Pasundan meninggalkan jejak pada situasi politik di Banten. Turut sertanya Hilman Djajadiningrat dalam pemerintahan Negara Pasundan menyelipkan tanda tanya besar terkait bagaimana kondisi yang mengakibatkan kaum pribumi memilih ikut serta dalam gerakan federalis daripada nasionalis. Bukan saja Hilman yang terlibat didalamnya, birokrat Negara Pasundan seperti Djumhana (ex. Bupati Pandeglang) memilih turut terlibat dalam pembentukan Negara Pasundan. Untuk mengetahui peristiwa yang konkrit terkait situasi politik di Banten, hendaknya Pemerintah Provinsi Banten lebih banyak lagi memperbanyak penelitian mengenai literature sejarah agar menambah wawasan serta terjaga dari kepunahan akan pengetahuan sejarah khususnya di Provinsi Banten.
2. Mengingat banyaknya potensi sejarah Nasional yang berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi di daerah Banten, maka alangkah baiknya apabila terus menggali wawasan sejarah untuk menambah koleksi penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dibangun atas sejarah masa lalunya, sehingga sudah pantas apabila Jurusan Sejarah

Peradaban Islam mengeskplorasi keragaman sejarah yang menjadi pondasi penting atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari pada itu, hendaknya pemahaman akan metodologi sejarah menjadi lebih penting dalam mengulik fakta-fakta sejarah yang ada agar tersusun dan didapatkan hasil karya penelitian sejarah yang konkrit dan sesuai dengan bukti sumber data yang sebenarnya.

4. Hendaknya dari peristiwa berdirinya Negara Pasundan ini, mahasiswa dan seluruh elemen masyarkat menyadari akan makmurnya sumber daya alam di tanah Republik Indonesia, sehingga seringkali faktor inilah yang menjadi indikasi para kolonial asing mengupayakan berbagai cara agar dapat memilikinya, baik itu dengan cara mengadu domba ataupun menggencarkan strategi militer. Oleh karena itu, untuk mengatasinya maka diperlukan jiwa nasionalis yang kuat agar tetap memegang teguh kesatuan Indonesia dengan cara memahami dan mengambil ibrah atas pentingnya peristiwa sejarah Indonesia.